



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Kami

PASTI

el, Sinergi, Transparan, Inovatif
ERSITY

2020

LAPORAN KINERJA



*BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM*

Jln. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok - Jawa Barat

Diterbitkan oleh

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 2020

BPSDM Hukum dan HAM

Jl. Raya Gandul No. 4

Depok Jawa Barat, 16512

Telp . 021-7540123

www.bpsdm.kemenkumham.go.id



BPSDM Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia
2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Penyusunan LKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian program kegiatan. Untuk itu diperlukan pengukuran dan pengevaluasian agar kerja dan kinerja tetap pada garis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan memberikan keterangan atas pencapaian kinerja tahun 2019. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014

tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2020 sebagai tahun paling menantang dalam “kehidupan pengabdian” lembaga pemerintah termasuk BPSDM Hukum dan HAM. Berbagai ujian kinerja mendera di tahun tersebut, tetapi BPSDM Hukum dan HAM tetap berusaha memenuhi tanggung jawabnya. Laporan Kinerja ini sebagai media BPSDM Hukum dan HAM mempertanggungjawabkan kerja dan kinerjanya walau pelatihan reguler yang dilakukan banyak disesuaikan dengan kondisi pandemi yang sedang mendera Indonesia dan dunia.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

*Kepala Badan Pengembangan SDM
Hukum dan HAM*

Asep Kurnia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Visi, Misi dan Tujuan.....	3
C. Struktur Organisasi BPSDM Hukum dan HAM.....	6
D. Sumber Daya Manusia.....	8
E. Peran Strategis.....	10
F. Sistematika Laporan.....	10
BAB II.....	13
A. Uraian Singkat Rencana Strategis.....	13
B. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III.....	17
A. Capaian Kinerja.....	17
B. Efisiensi Anggaran Tahun 2020.....	25
C. Prestasi BPSDM Hukum dan HAM.....	28
D. Prioritas Nasional.....	29
BAB IV.....	32
A. Kesimpulan.....	32
B. Rencana Tindak Lanjut.....	33
REFERENSI.....	34
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	9
Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	9
Grafik 3.1 Grafik Tindak Lanjut Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi.....	19
Grafik 3.2 Target Capaian Pengembangan Kompetensi 2020	21
Grafik 3.3 Capaian Pengembangan Kompetensi 2020.....	21



DAFTAR TABEL

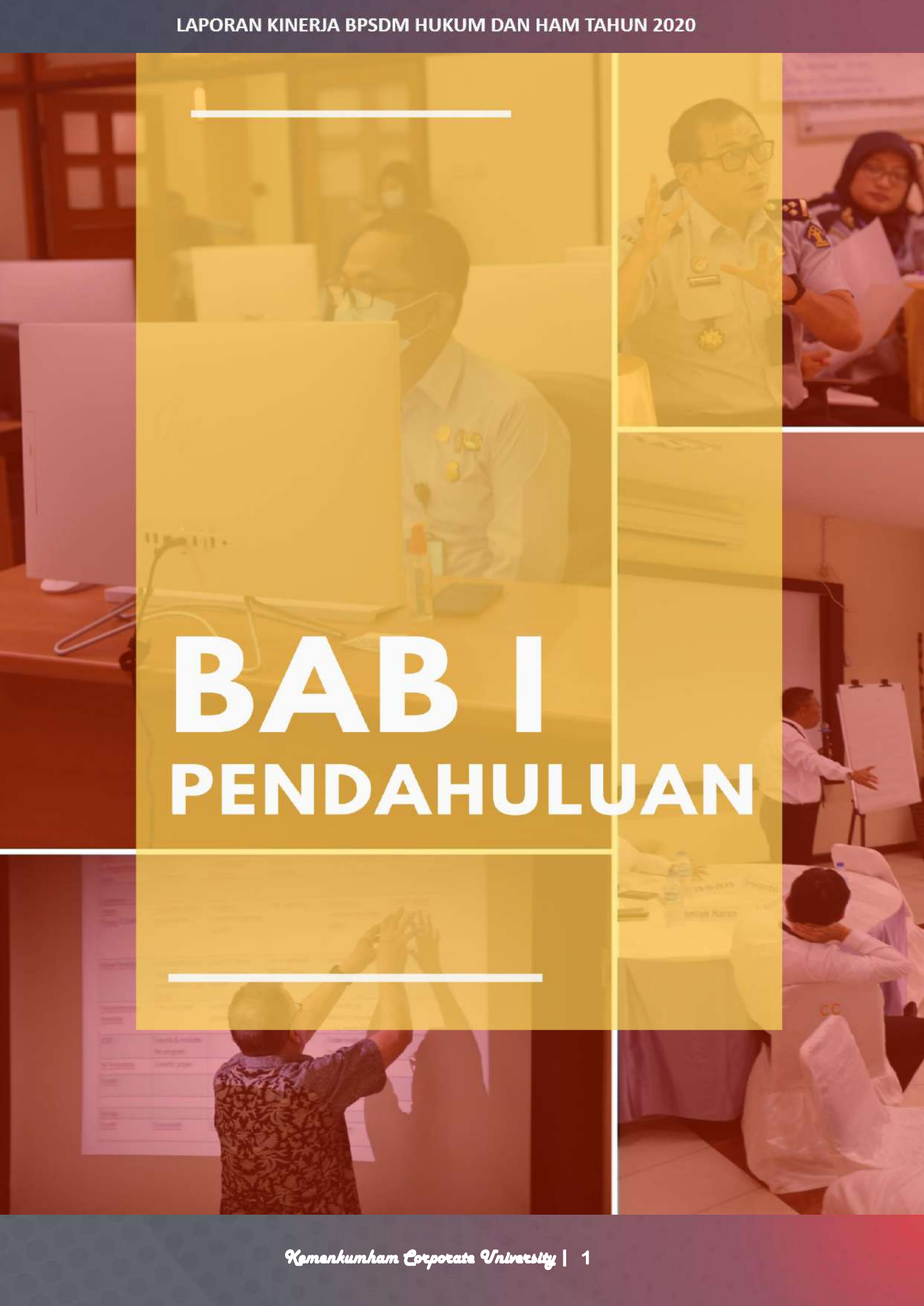
Tabel 2.1 Sasaran Strategis 2020-2024 BPSDM Hukum dan HAM.....	13
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020.....	15
Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020.....	17
Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja 2020*	19
Tabel 3.3 Capaian Output Pengembangan Kompetensi 2020.....	21
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Output Pengembangan Kompetensi 2019 dan 2020.....	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur BPSDM Hukum dan HAM.....	8
Gambar 2.1 Peta Strategi BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024.....	14





BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan kedua Jokowi mempunyai perhatian khusus terhadap pembangunan manusia, hal ini dapat kita lihat pada Nawacita kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin di point satu yang berbunyi ***Peningkatan kualitas manusia Indonesia***. Kemudian ditekankan kembali dalam 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) juga di point pertama yang berbunyi ***Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global***.

Pembangunan manusia menjadi penting karena hal tersebut merupakan kunci utama Indonesia untuk terus melaju di dalam pembangunan, terlebih Indonesia saat ini memasuki bonus demografi (2015-2035). Bonus demografi bisa menjadi beban besar bagi negara jika tidak diimbangi dengan pembangunan manusia yang berkualitas.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai kementerian yang besar jumlah pegawainya (kurang lebih 60.000 pegawai) memiliki

kepedulian dalam meningkatkan kompetensi pegawainya tersebut. Peningkatan tersebut dimaksudkan agar ASN di Kemenkumham menjadi pegawai yang berkualitas sehingga dapat menjadi pendorong kemajuan Indonesia dalam menghadapi bonus demografi.

Peningkatan kompetensi ASN di Kemenkumham juga searah dengan salah satu dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan pemerintahan periode kedua Jokowi yang berbunyi ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik***. Memperkuat transformasi pelayanan publik tidak akan berhasil jika tidak ditopang dengan SDM yang berkompetensi sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri.

Tugas peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Kemenkumham diamanahi kepada BPSDM Hukum dan HAM. Dalam menjalankan tugas pokoknya, BPSDM Hukum dan HAM bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, BPSDM Hukum dan HAM yang detilnya akan dijelaskan kemudian.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BPSDM Hukum dan HAM melakukan evaluasi terhadap program-program dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu evaluasi yang rutin dilakukan setiap tahun adalah evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi terhadap kinerja ini dituangkan di Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014.

LKIP yang disusun BPSDM Hukum dan HAM bertujuan agar aktivitas yang dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Perencanaan dengan indikator-indikator disusun sebagai *guidance* agar aktivitas BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada bagaimana mencapai target-target dalam indikator tersebut. LKIP juga disusun dalam rangka keterbukaan informasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Keterbukaan informasi yang kemudian digunakan oleh *stake holder* untuk menilai sejauh mana BPSDM Hukum dan HAM telah menjalankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

B. Visi, Misi dan Tujuan

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang**

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi

dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan

Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk; mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/ WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian

Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

1. Tugas BPSDM Hukum dan HAM
BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Fungsi BPSDM Hukum dan HAM
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1191 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan Kebijakan Teknis, Program dan Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - d) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya

Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- e) Pelaksanaan Administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi BPSDM Hukum dan HAM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM terdiri dari beberapa fungsi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM
Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja dan keuangan serta melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrative kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan BPSDM Hukum dan HAM.
2. Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan
Melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan (diklat) serta melakukan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman pengembangan diklat dibidang teknis dan Kepemimpinan.
3. Kepala Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM
Melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan

dan pelatihan (diklat) serta melakukan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman pengembangan diklat dibidang Fungsional dan HAM.

4. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
Melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi pengembangan SDM serta melakukan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman standardisasi dan penilaian kompetensi.
5. Direktur Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
Melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Ilmu Pemasaryakatan serta melakukan penelitian terapan dan pengabdian

kepada masyarakat dibidang Pemasaryakatan.

6. Direktur Politeknik Imigrasi
Melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Keimigrasian serta melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Keimigrasian.
7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM
BPSDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM yang berada di Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara dengan tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

Bagan struktur organisasi BPSDM Hukum dan HAM dapat dilihat dalam bagan berikut:



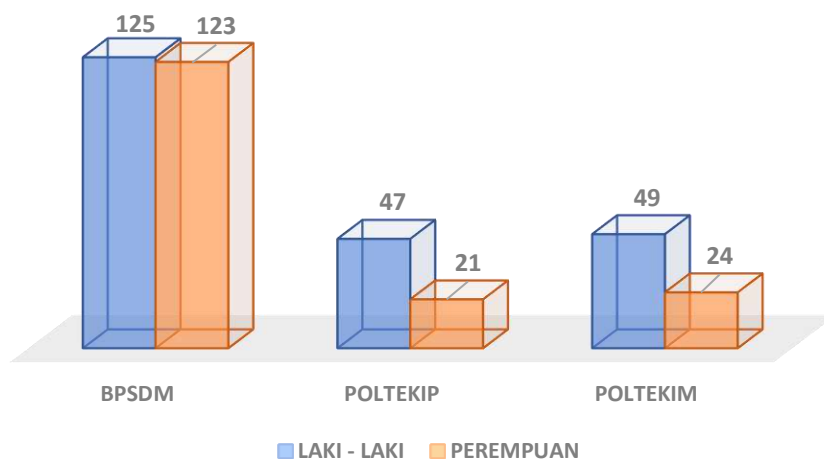
Gambar 1.0.1 Struktur BPSDM Hukum dan HAM

D. Sumber Daya Manusia

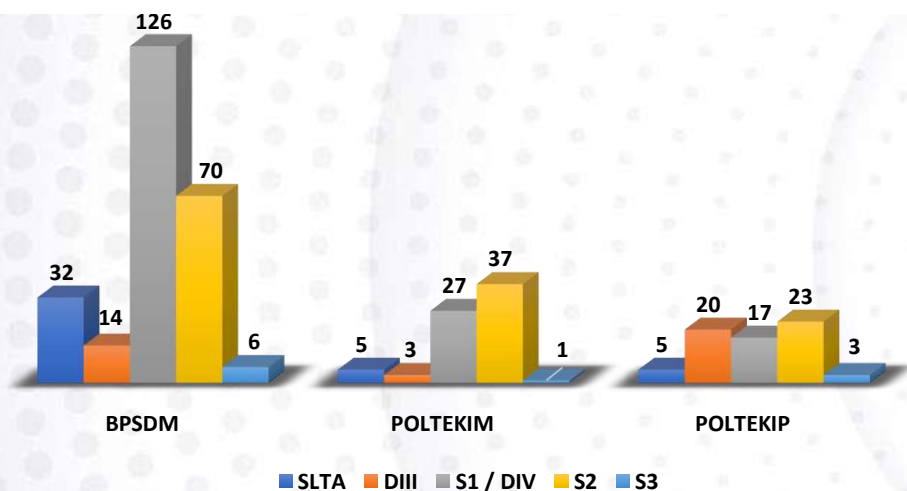
BPSDM Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengembangan SDM

didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 389 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda

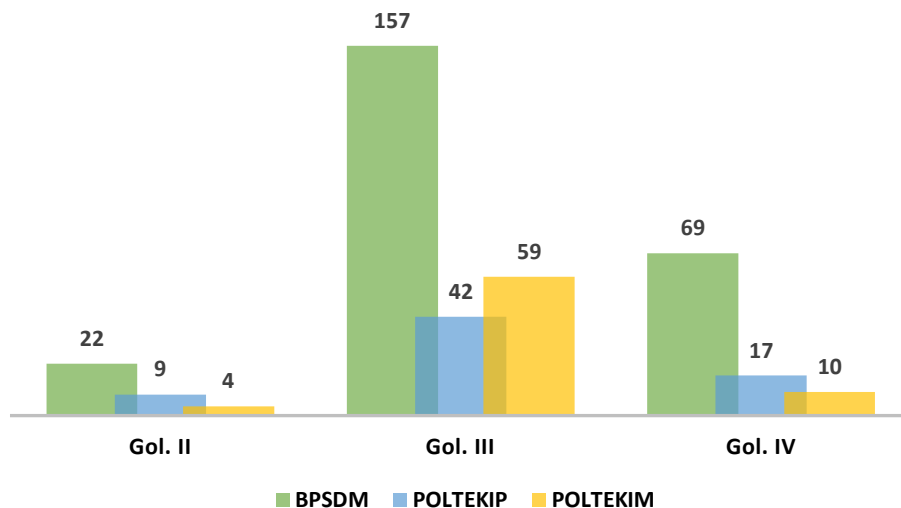
Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Per 31 Desember 2020)



Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Per 31 Desember 2020)



Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan (Per 31 Desember 2020)



E. Peran Strategis

Amanah pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang dimandatkan kepada BPSDM Hukum dan HAM tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1191, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Peningkatan kualitas SDM aparatur negara ini merupakan upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk menjawab tantangan masa kini yang dihadapi oleh organisasi seperti tingginya jumlah pegawai, tingginya jumlah pegawai generasi milenial, era disrupsi dan perkembangan era industri 4.0. Di sisi lain,

tingginya jumlah pegawai tersebut belum diikuti dengan ketersedianya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Tantangan dan keterdesakan lingkungan kerja yang sukses memanfaatkan teknologi, membuktikan bahwa strategi pengembangan Sumber Daya Manusia tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem konvensional. Pembentukan budaya kerja dalam lingkup sebagai organisasi pembelajar juga harus dikembangkan. Maka dengan tantangan dan desakan zaman, BPSDM Hukum dan HAM berusaha untuk melakukan penyesuaian, berikut penyesuaian yang ingin di terapkan:

1. Pembangunan SDM bidang hukum dan HAM yang yang berkompetensi tinggi melalui rumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan sosio-kultural SDM Hukum dan HAM melalui rumusan kebijakan dan penyelenggaraan program pengembangan terintegrasi dalam skema *Corporate University*.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek peran strategis BPSDM Hukum dan HAM, serta strategis unit organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian ringkasan/ikhtisar rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, sasaran kinerja pegawai, perjanjian kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian capaian kinerja pada setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, serta perbandingan capaian kinerja. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2019 terkait dengan tugas pokok dan tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tahun 2019 yang dirangkum kedalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.

REFERENSI

LAMPIRAN





BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Uraian Singkat Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024 merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024. Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Sasaran strategis disusun melalui pendekatan 4 perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
2. Perspektif Proses Internal
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
4. Perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 2020-2024 BPSDM Hukum dan HAM

Perspektif	Sasaran Strategis
Pemangku Kepentingan	Menjadi unit utama yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan
Proses Internal	1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi berbasis TI 2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi 3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, Penyelenggara, dan Pengelola) 4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir 5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas
Pembelajaran dan Pertumbuhan	1. Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompetensi tinggi dan terkreditasi 2. Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan peran 3. Menjalin kerjasama sinergis dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik
Disiplin Anggaran	Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan akuntabel



Visi Kementerian Hukum dan HAM

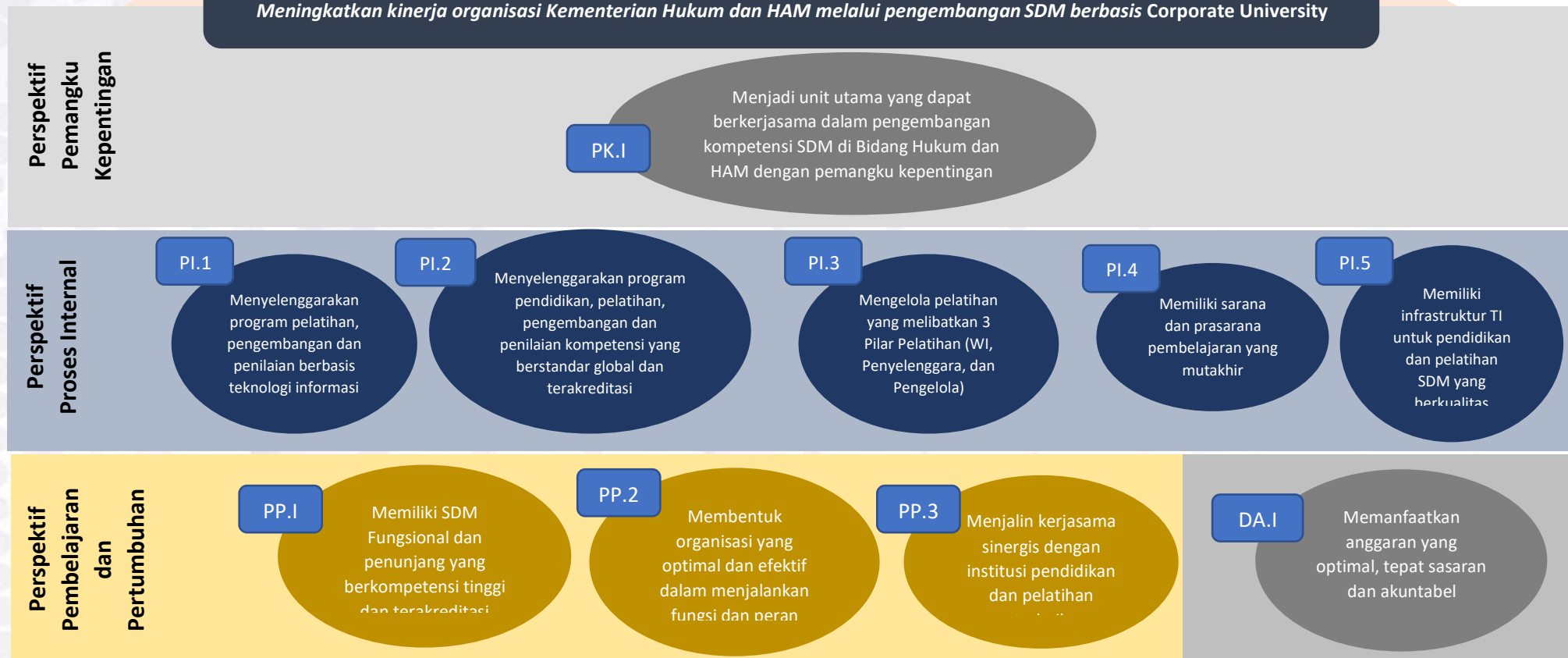
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan Strategis BPSDM Hukum dan HAM:

Meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University



Gambar 2.1 Peta Strategi BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM adalah dokumen berisikan penugasan dari Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah kinerja BPSDM Hukum dan HAM menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini diselaraskan

dengan rencana kinerja tahunan 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Berikut dokumen Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2019. Dokumen legal Perjanjian BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 dapat dilihat di lampiran.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	75%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	85%
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	85%
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%

Perjanjian Kinerja ditetapkan pada Desember 2019, tetapi di tahun 2020 terjadi pembahasan kembali Rencana Strategis 2020-2024 yang

merubah angka indikator yang terdapat di dalam Perjanjian Kinerja 2020. Perubahan tersebut adalah :

Indikator Kinerja	Target	
	Lama	Baru
Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	90%	75%

**KAIDAH DASAR UNTUK MENEMPUH
KARIER YANG BAIK**

Agama

Kesusilaan

Kesopanan

Etika

Humor



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

**HAKEKAT DIKLAT:
KEMAJUAN DAN KEMAMPUAN
MENDIDIK DIRI SENDIRI**

**CERDAS-TRAMPIL
BERMARTABAT**



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Akuntabilitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM merupakan perwujudan atas kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja 2020 BPSDM Hukum dan HAM untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Perwujudan pertanggungjawaban kinerja tersebut dihitung berdasarkan target yang

telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020.

Tingkat keberhasilan dan kegagalan yang dicapai dilakukan dengan pengukuran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dengan cara cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

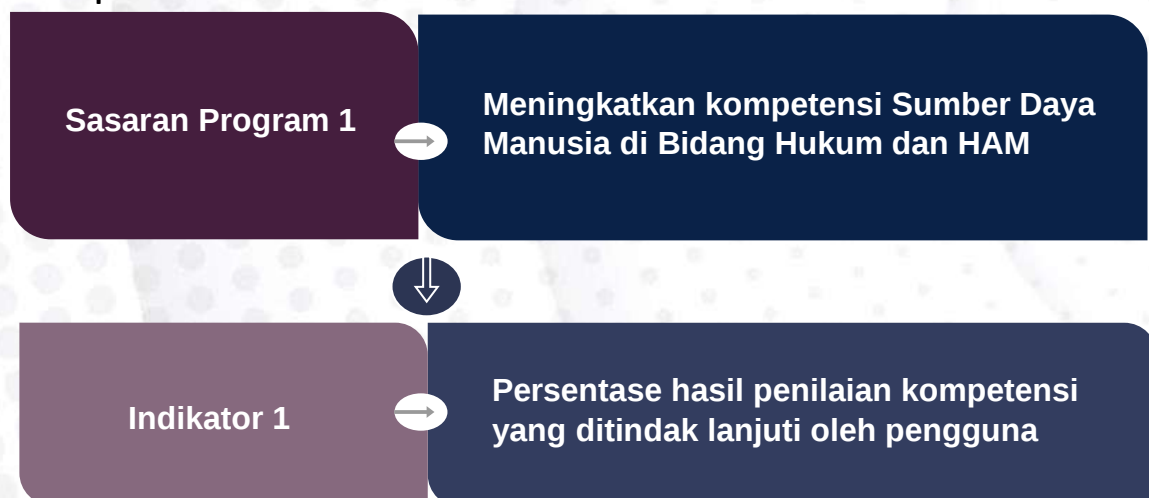
A. Capaian Kinerja

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	75%	81%	108%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	85%	70%	82%
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	85%	96%	113%
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	100%	105%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	75%	81%	108%	233.879.511.000	228.392.914.900	97,65
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	85%	70%	82%			
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	85%	96%	113%			
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	100%	105%			

Analisa Capaian Indikator



Indikator **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindak lanjuti oleh pengguna** bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan oleh unit pengguna. Pada Periode Tahun 2019-2020, Pusat Penilaian Kompetensi melakukan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi kepada 12 Unit kerja di Lingkungan kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan tersebut berupa dilakukannya

monitoring untuk mengetahui seberapa besar pembina kepegawaian atau pihak berwenang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil penilaian kompetensi yang telah diberikan. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa sebanyak 81 % atau 281 pegawai dari sasaran target monitoring kepada 348 pegawai telah dilakukan pemanfaatan Hasil Penilaian kompetensi.

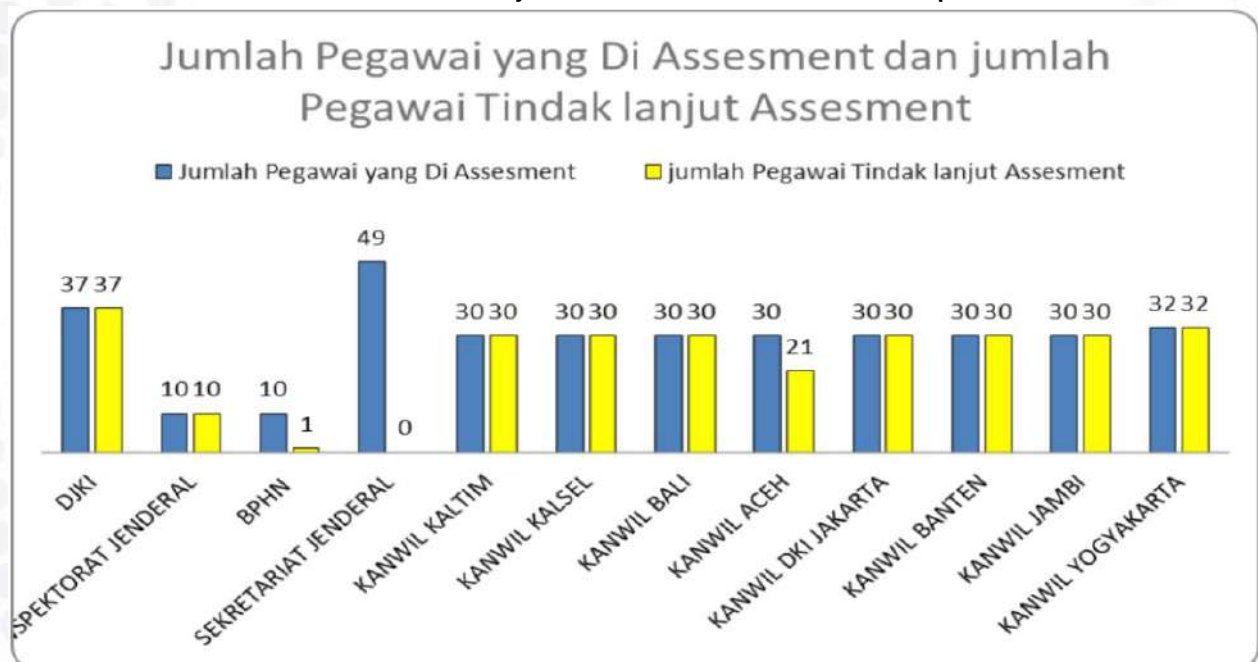
Adapun Unit Kerja yang dijadikan sampel survei sebanyak 8 Kantor Wilayah, dan 4 Unit Pusat Eselon 1. Bentuk Pemanfaatan Hasil Uji Kompetensi yang paling banyak dilakukan adalah Pelatihan, sedangkan yang paling sedikit adalah bentuk pengembangan dengan metode datasering (penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu).

Dalam pencapaian indikator ini diperoleh dari rekapitulasi data survei Monitoring dan data dukung untuk memvalidasi data berupa dokumen seperti Surat Keputusan

ataupun sertifikat kegiatan yang telah dilakukan (LKIP Puspenkom 2020). Berikut grafik yang memperlihatkan jumlah pegawai yang telah dilakukan tindak lanjut pemanfaatan assesment oleh pengguna.

Walaupun target indikator tercapai tetapi angka realisasi tidak mencapai 100% maka diperlukan sosialisasi kepada seluruh *user* (unit pengguna) agar menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan ke dalam perencanaan pengembangan dan perencanaan pola karir pegawai.

Grafik 3.1 Grafik Tindak Lanjut Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi



Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja 2020*

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	75%	81%	108%

*data berasal dari LKIP Pusat Penilaian Kompetensi tahun 2020

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2019- 2020

No.	Indikator Kinerja	2020			2019*		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	75%	81%	108%	70%	46%	65,71%

*data berasal dari LKIP BPSDM Hukum dan HAM tahun 2019

Pencapaian di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 pada indikator **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna** meningkat. Pada tahun 2019 realisasi tidak mencapai

target sedangkan pada 2020 realisasi mencapai target. Sehingga tahun 2020 secara realisasi dan capaian meningkat drastis.

Indikator 2

Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi selama 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahunnya. Dalam usaha untuk memenuhi

kewajiban institusi dalam mengembangkan kompetensi pegawainya tersebut, Kementerian Hukum dan HAM melalui BPSDM Hukum dan HAM menetapkan target pengembangan kompetensi di dalam Renstranya sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	85%	90%	92%	93%	93%

Berdasarkan tabel di atas, maka BPSDM Hukum dan HAM dalam aktivitas pengembangan kompetensi kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ditargetkan mencapai 85% dari jumlah PNS Kementerian Hukum dan HAM.

Di bawah ini akan dijelaskan capaian output dari program dan aktivitas pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM beserta satuan kerjanya selama tahun 2020.

**Tabel 3.3 Capaian Output Pengembangan Kompetensi 2020
BPSDM Hukum dan HAM**

No.	Unit / Satker	Pengembangan Kompetensi			Total
		PJJ*/Klasikal	E-Learning	Pendidikan	
1	Pusbang Tekpin	827	35.532		36.359
2	Pusbang Fungham	1.221	469		1.690
3	Badiklat Sulut	230	1.320		1.550
4	Badiklat Jateng	303	811		1.114
5	Badiklat Kepri	240	791		1.031
6	Poltekip			1.001	1.001
7	Poltekim			968	968
Total		43.713			

*Pembelajaran Jarak Jauh

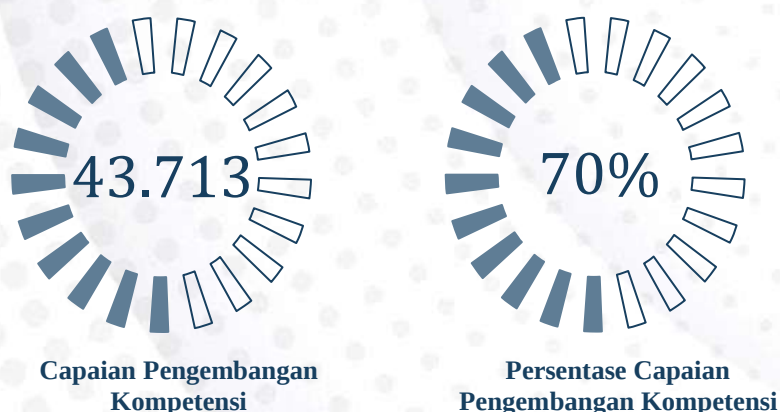
Tabel di atas menunjukkan bahwa total output pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2020 sebesar 43.713 peserta pengembangan kompetensi. Dengan total jumlah ASN Kementerian Hukum dan HAM yang sebesar 62.770

pegawai dan target pengembangan kompetensi 2020 adalah 85% dari total ASN Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga total target pengembangan kompetensi tahun 2020 adalah 53.335 peserta pengembangan kompetensi.

Grafik 3.0.2 Target Capaian Pengembangan Kompetensi 2020



Grafik 3.3 Capaian Pengembangan Kompetensi 2020



Berdasarkan pemaparan data dan grafik di atas maka target pengembangan kompetensi di tahun 2020 tidak tercapai. Terdapat selisih 15% antara capaian 2020

dengan target 2020. Tidak tercapainya target pengembangan kompetensi ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang mendera Indonesia.

Dikarenakan pandemi tersebut terjadi penyesuaian pelaksanaan pelatihan, banyak pelatihan yang dilaksanakan dengan metode klasikal dibatalkan dan sebagiannya diubah menjadi pelatihan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau *E-learning*. Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah memfokuskan anggaran ke bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Refocusing anggaran tersebut juga

menjadikan BPSDM Hukum dan HAM melakukan pengalihan anggaran yang berakibat berkurangnya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan.

Capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM dalam aktivitas pengembangan kompetensi pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Lebih detilnya dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Output Pengembangan Kompetensi 2019 dan 2020 BPSDM Hukum dan HAM

No.	Unit / Satker	Pengembangan Kompetensi					
		2019*			2020		
		PJJ** / Klasikal	E-Learning	Pendidikan	PJJ* / Klasikal	E-Learning	Pendidikan
1	Pusbang Tekpim	1.743	33.591		827	35.532	
2	Pusbang Fungham	1.233	120		1.221	469	
3	Badiklat Sulut	400	162		230	1.320	
4	Badiklat Jateng	415	287		303	811	
5	Badiklat Kepri	383	320		240	791	
6	Poltekip			692			1.001
7	Poltekim			1.295			968
Total		40.641			43.713		

*Data berasal dari Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM 2019

**Pembelajaran Jarak Jauh

Dibandingkan dengan capaian pengembangan kompetensi di tahun 2019, pengembangan kompetensi 2020

mengalami peningkatan sebesar 3.072 peserta pengembangan kompetensi.

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2019- 2020

No.	Indikator Kinerja	2020*			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	85%	70%	82%	NN	NN	NN

*data berasal dari Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM 2020

Indikator **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi**

tidak dapat dibandingkan antara tahun 2020 dan 2019 karena indikator ini tidak ada di tahun 2019

Indikator 3

Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya

Indikator ini ingin mengukur sejauh mana peserta pelatihan setelah kembali melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi. Hal ini agar hasil pelatihan menjadi kompetensi pegawai tersebut. Sehingga unit dimana alumni tersebut

diharapkan menempatkan alumni tersebut di bidang kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan melalui evaluasi pasca pelatihan dengan hasil di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	85%	96%	113%

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2019- 2020

No.	Indikator Kinerja	2020			2019*		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	85%	96%	113%	70%	99%	142%

*data berasal dari LKIP BPSDM Hukum dan HAM 2019

Pada tabel perbandingan di atas, dapat kita lihat bahwa kedua tahun perbandingan di

atas memenuhi target yang telah ditentukan.

Sasaran Program 2

Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasarakatan dan Keimigrasian

Indikator 1

Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan

Para peserta didik (taruna / taruni) dari Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) mendapatkan pendidikan sebagai persiapan mereka dalam melaksanakan tugas di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Oleh karena itu para taruna-taruni setelah lulus dimaksudkan untuk mengisi berbagai posisi di lingkungan Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasarakatan.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki 11 unit eselon satu di tingkat pusat dan 33

Kantor Wilayah. Dengan besarnya organisasi tersebut dan kebutuhan SDM yang besar, seringkali lulusan Poltekip dan Poltekim ditugaskan di luar Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasarakatan. Penempatan seperti ini tidak sesuai dengan manajemen talenta yang menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya atau pendidikannya. Oleh karena itu indikator 3 ini menjadi penting sebagai keberhasilan BPSDM Hukum dan HAM dalam hal ini Poltekim dan Poltekip dalam mengelola talenta lulusannya.

No.	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	85%	90%	92%	93%	93%

Penempatan lulusan Politeknik Imigrasi

Pada tahun 2020 Poltekim meluluskan 234 taruna yang terdiri 124 taruna D-IV dan 110 taruna D-IV Lanjutan. Untuk taruna lulusan D-IV Lanjutan, mereka akan kembali ke unit asal mereka yaitu unit di lingkungan Ditjen Imigrasi. Sedangkan untuk lulusan taruna D-IV, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) No. 885 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan Politeknik Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi bahwa seluruh lulusan Poltekim di tahun 2020 mendapatkan penempatan di lingkungan Ditjen Imigrasi. Isi surat keputusannya dapat dilihat di lampiran.

Penempatan lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Berdasarkan Surat Acara Pelaksanaan Pemilihan Penempatan Taruna Wreda Angkatan 51 tahun Akademik 2020 bahwa seluruh lulusan Poltekip di tahun 2020 mendapatkan penempatan di lingkungan Ditjen Pemasarakatan. Isi Surat Acara Pelaksanaan Pemilihan Penempatan dapat dilihat di lampiran.

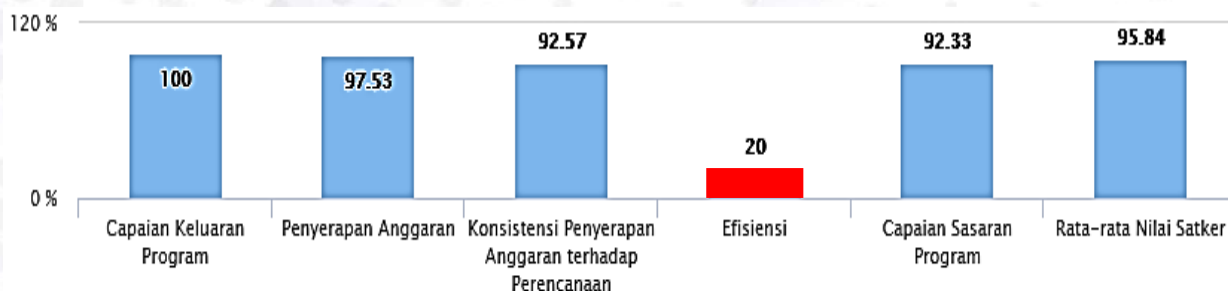
Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, penempatan lulusan Poltekim dan Poltekip di tahun 2020 telah 100% sesuai dengan kompetensi jabatannya.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	85%	100%	118%

No.	Indikator Kinerja	2020			2019*		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	85%	100%	118%	100%	100%	100%

*data berasal dari LKIP BPSDM Hukum dan HAM 2019

B. Efisiensi Anggaran Tahun 2020



* Capaian Keluaran Program (CKP) dan Capaian Sasaran Program (CSP) diukur menggunakan formula rata - rata geometrik.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, BPSDM Hukum dan HAM merealisasikan penggunaan anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja maka diperoleh nilai efisiensi anggaran. Dengan cara tersebut, didapatkan angka Efisiensi Sebesar 20% dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Dengan asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran yang telah dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah maksimal atau sangat baik. Adapun faktor yang membuat nilai menjadi maksimal adalah:

1. Masa pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan pelatihan pada BPSDM Hukum dan HAM yang awalnya sebagian besar dalam bentuk klasikal (menghadirkan peserta ke BPSDM) menjadi Pelatihan Jarak Jauh dan e-learning. Hal ini tentunya menghemat

anggaran pelatihan yang cukup signifikan karena metode pelatihan secara Jarak Jauh dan e-learning tidak memerlukan biaya perjalanan dinas, biaya makan peserta, dan perlengkapan peserta, sehingga anggaran tersebut dapat dialihkan untuk keperluan lain maupun menambah output pelatihan;

2. Pelaksanaan kegiatan CoP (*Community Of Practice*) pada 3 (tiga) Balai Diklat Hukum dan HAM secara daring menyumbang jumlah output pelatihan secara signifikan. Jumlah output pada pelaksanaan CoP pada 3 (tiga) badiklat mencapai 1.979 orang;
3. Pelaksanaan Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan Taruna/taruni pada Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan secara Jarak Jauh menghemat anggaran ±7 (tujuh) Miliar rupiah dari anggaran makan taruna tanpa mengurangi target output taruna;
4. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi yang menggunakan CBT (Computer based Test) juga menghemat anggaran pada Pusat Penilaian

Kompetensi, khususnya pada pelaksanaan SJT (*Situational Judgement Test*) dan EPT (*English Placement Test*) dengan output mencapai 62.711 peserta;

5. Penghematan belanja daya/listrik karena hanya sedikit kegiatan pelatihan secara fisik di BPSDM Hukum dan HAM.

Seperti yang dapat di lihat digrafik diatas, BPSDM Hukum dan HAM mendapatkan nilai angka efisien sebesar 20 (duapuluh). Penghitungan angka tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 / PMK.02/20 17 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat eselon I /program dan tingkat satuan kerja/

kegiatan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi meliputi :

- a. data capaian keluaran (CK) program / kegiatan;
- b. data target volume keluaran (TVK) program/kegiatan;
- c. pagu anggaran; dan
- d. realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran Rumus untuk pengukuran efisiensi sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n (PAK \times CK) - RAK}{\sum_{i=1}^n PAK \times CK} \times 100\%$$

Tabel Capaian Kinerja Program Kegiatan BPSDM Hukum dan HAM TA 2020

No.	Nama Kegiatan	PAK	RAK	Total TVK (Volume)	Total CK (Volume)
1.	1620 Pendidikan Kedinasan	52.310.858.000	50.096.642.049	2.057,00	2.147,45
2.	1621 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM	7.506.035.000	6.360.753.921	1.539,00	1.466,00
3.	1622 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	2.076.640.000	2.033.169.739	4.800,00	10.095,00
4.	1623 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	6.644.085.000	6.075.202.817	36.898,00	36.183,00
5.	1624 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	113.187.629.000	111.882.999.290	3,00	3,00
6.	5249 Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	52.154.264.000	51.660.760.200	1.369,00	4.596,75
Total		233.879.511.000	228.109.528.016	46.666,00	54.491,20

(sumber: SMART DJA)

Berdasarkan tabel diatas maka nilai efisiensi kinerja anggaran BPSDM TA 2020 sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n (PAK \times CK) - RAK}{\sum_{i=1}^n PAK \times CK} \times 100\%$$

$$Efisiensi = \left(\frac{((PAK1 \times CK1) - RAK1) + ((PAK2 \times CK1) - RAK2) + ((PAK2 \times CK1) - RAK2) + ((PAK3 \times CK3) - RAK3) + ((PAK4 \times CK4) - RAK4) + ((PAK5 \times CK5) - RAK5) + ((PAK6 \times CK6) - RAK6)}{(PAK1 \times CK1) + (PAK2 \times CK1) + (PAK3 \times CK3) + (PAK4 \times CK4) + (PAK5 \times CK5) + (PAK6 \times CK6)} \right) \times 100\%$$

Efisiensi Anggaran BPSDM

$$= \left(\frac{((52.310.858.000 \times 2.147,45) - 50.096.642.049) + ((7.506.035.000 \times 1.466) - 6.360.753.921) + ((2.076.640.000 \times 10.095) - 2.033.169.739) + ((6.644.085.000 \times 36.183) - 111.882.999.290) + ((113.187.629.000 \times 3,00) - 111.882.999.290) + ((52.154.264.000 \times 4.596,75) - 51.660.760.200)}{(52.310.858.000 \times 2.147,45) + (7.506.035.000 \times 1.466) + (2.076.640.000 \times 10.095) + (6.644.085.000 \times 36.183) + (113.187.629.000 \times 3,00) + (52.154.264.000 \times 4.596,75)} \right) \times 100\%$$

Efisiensi Anggaran BPSDM

$$= \frac{112,284,855,370,051 + 10,997,486,556,079 + 20,961,647,630,264 + 240,291,044,555,710 + 227,679,887,710 + 239,688,452,281,800}{112.334.952.012.100 + 11,003,847,310,000 + 20,963,680,800,000 + 240,402,927,555,000 + 339,562,887,000 + 239,740,113,042,000} \times 100\%$$

$$Efisiensi Anggaran BPSDM = \frac{624,451,166,281,614}{624,785,083,606,100} \times 100\% = 0,99 \times 100\% = 99\%$$

Dari hasil penghitungan di atas, diperoleh nilai efisiensi kinerja anggaran sebesar 99%. Meskipun dari hasil penghitungan tersebut, nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 99%, tetapi secara sistem pada aplikasi SMART DJA nilai efisiensi yang ditampilkan hanya sampai 20% untuk nilai maksimal dan -20% untuk nilai minimal.

C. Prestasi BPSDM Hukum dan HAM

Selain berhasil melaksanakan tugas dan fungsi sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi sumber daya manusia hukum dan HAM, BPSDM juga berhasil memperoleh beberapa prestasi antara lain:

1. Pengakuan Kelayakan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pada tanggal 19 Oktober 2020, BKN menyerahkan hasil akreditasi uji

kelayakan penyelenggaraan penilaian kompetensi kepada BPSDM Hukum dan HAM dengan predikat A. Penilaian ini berdasarkan tiga komponen utama yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga penilaian kompetensi antara lain: organisasi, sumber daya manusia dan metode/pelaksanaan penilaian kompetensi. Diharapkan prestasi ini bisa mendorong semua elemen di BPSDM Hukum dan HAM untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi.



2. Penghargaan Dari Badan Kepegawaian Negara

Disamping memperoleh akreditasi penyelenggaraan penilaian kompetensi, BPSDM Hukum dan HAM melalui Pusat Penilaian Kompetensi memperoleh peringkat I kategori pemanfaatan SAPK

dan Pemanfaatan CAT serta peringkat II untuk kategori Penilaian Kompetensi Kementerian dan Lembaga Negara.pada BKN Award



3. Predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dari Kementerian PAN dan RB

Sejak mencanangkan program Zona Integritas WBK/WBM pada awal tahun 2020 pada semua satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Segala upaya pembangunan ZI telah

dilaksanakan agar BPSDM Hukum dan HAM memperoleh predikat WBK/WBM dari KemenPAN/RB. Berdasarkan hasil evaluasi dari tim penilai dua satuan kerja di bawah BPSDM Hukum dan HAM yaitu Politeknik Imigrasi dan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ditetapkan memperoleh predikat WBK/WBBM.



D. Prioritas Nasional

Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan amanah untuk melaksanakan Prioritas Nasional yang teknis pelaksanaannya diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada tahun 2020 Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan diselenggarakan sebanyak delapan (8) angkatan dengan total 320 peserta dan dengan capaian 100% sedangkan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak delapan (8) angkatan dengan total 270 peserta dan dengan capaian 100%. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Target	Realisasi Target	Capaian	Pagu	Realisasi Pagu	%
Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan								
1	Akt. XXVII	22 Juli s/d Ag 2020	40	40	100%	1.612.137.000,-	1.342.580.000,-	83%
2	Akt. XXVIII	29 Juli s/d 27 Ag 2020	40	40	100%			
3	Akt. XXIX	13 Ag s/d 14 Sept 2020	40	40	100%			
4	Akt. XXX	27 Ag s/d 23 Sept 2020	40	40	100%			
5	Akt. XXXI	07 Sept s/d 02 Okt 2020	40	40	100%			
6	Akt. XXXII	14 Sept s/d 09 Okt 2020	40	40	100%			
7	Akt. XXXIII	06 Okt s/d 05 Nov 2020	40	40	100%			
8	Akt. XXXIV	19 okt s/d 18 nov2020	40	40	100%			
Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak								
1	Akt. XLVII	4 Maret - 18 Mar 2020	30	30	100%	1.248.100.000,-	1.041.382.387,-	83%
2	Akt. XLVIII	17 Juni – 4 Juli 2020	30	30	100%			
3	Akt. XLIX	1 Juli – 18 Juli 2020	30	33	110%			
4	Akt. L	22 Juli- 10 Ag 2020	30	29	97%			
5	Akt. LI	12 Ags-1 Sept 2020	30	29	97%			
6	Akt. LII	02-19 Sept 2020	30	29	97%			
7	Akt. LIII	22 Sep- 10 Okt 2020	30	30	100%			
8	Akt. LIV	15 okt-04 Nov 2020	30	30	100%			
		04 Nov - 21 Nov 2020	30	30	100%			



BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, BPSDM Hukum dan HAM menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran selama tahun 2020. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPSDM Hukum dan HAM untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2020, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang memenuhi target yaitu **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna sebesar 81%, Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya sebesar 96% dan Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaran yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan sebesar 100%**. Sedangkan indikator yang tidak mencapai target adalah **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi sebesar 70% dari 80% yang ditargetkan**, meskipun demikian secara kuantitas mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	75%	81%	108%	233.879.511.000	228.392.914.900	97,65
		Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	85%	70%	82%			
		Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	85%	96%	113%			
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	100%	105%			

B. Rencana Tindak Lanjut

Agar di tahun mendatang seluruh indikator dapat tercapai targetnya dan dalam kualitas serta kuantitas meningkat kinerja, maka BPSDM Hukum dan HAM perlu melakukan :

1. Sosialisasi kepada seluruh user (unit pengguna) agar menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan kedalam perencanaan pengembangan dan perencanaan pola karir pegawai.
2. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pelatihan dan penilaian kompetensi serta dalam proses bisnis internal BPSDM Hukum dan HAM.
3. Penerapan pengembangan kompetensi dengan metode *Corporate University* agar menjangkau seluruh ASN Kemenkumham dengan berbagai bentuk pengembangan kompetensi yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan

pengembangan kompetensi ASN Kemenkumham.

4. Peserta pelatihan khususnya pelatihan *E-Learning* diberi keluangan waktu dalam mengikuti pelatihan *E-Learning* agar bisa optimal dalam mengikuti pelatihan dan pembelajaran tersebut. Hal ini juga akan mengoptimalkan *output* dan *outcome* dari BPSDM Hukum dan HAM.
5. Hasil pelatihan dimasukkan kedalam penilaian kinerja agar peserta pelatihan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran.

Demikian laporan kinerja yang disampaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

REFERENSI

1. Laporan Tahunan 2019 BPSDM Hukum dan HAM
2. Laporan Tahunan 2020 BPSDM Hukum dan HAM
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 BPSDM Hukum dan HAM
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Pusat Penilaian Kompetensi, BPSDM Hukum dan HAM
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, BPSDM Hukum dan HAM
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah
9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Politeknik Imigrasi
11. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Politeknik Ilmu Pemasarakatan
12. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2020 Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, BPSDM Hukum dan HAM
13. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2020 Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM
14. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau
15. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah
16. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Min Usihen, S.H., M.H.
Jabatan : Pjt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Yasonna H. Ladoy
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku alasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Ladoy

Pihak Pertama
Pjt. Kepala BPSDM Hukum dan HAM



Min Usihen, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001

Jakarta, 19 November 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kementerian hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90% 85%
2	Terpernuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang dan pemasarakatan	Persentase ASN Kemendikham yang mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase Lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dengan predikat memuaskan Persentase Lulusan politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	95% 95%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 456.720.163.000,-
1	Pendidikan Kedinasan	Rp. 61.538.844.000,-
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM	Rp. 9.440.345.000,-
3	Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Rp. 4.100.000.000,-
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	Rp. 10.445.687.000,-
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 307.340.325.000,-
6	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Rp. 63.854.962.000,-

Pihak Kedua
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Ladoy

Pihak Pertama
Pjt. Kepala BPSDM Hukum dan HAM



Min Usihen, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001

Jakarta, 19 November 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Min Usihen, S.H., M.H.
Jabatan : Pjt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 November 2019

Pjt. Kepala BPSDM Hukum dan HAM



Min Usihen, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001

2. Perubahan Indikator di dalam Perjanjian Kinerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOTA DINAS
NOMOR : SDM.3-SM.06.01-90

Yth. : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dari : Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
Hal : Usulan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Pusat Penilaian Kompetensi Tahun Anggaran 2020-2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 4 Maret 2020

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM.1-PR.01.03-38 tanggal 28 Februari 2020 perihal Masukan terhadap Indikator dan Target Kinerja TA 2020, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Usulan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Pusat Penilaian Kompetensi Tahun Anggaran 2020-2023 (*berkas terlampir*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Nuni Suryani
NIP. 19620727 198703 2 001

Tembusan :
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
(sebagai laporan).

MATRIK UPDATE KRISNA TAHUN 2020
PROGRAM DIKLAT APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SEMULA						MENJADI								MASUKAN					
KODE	SASARAN PROGRAM/KEGATAN/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				KODE	SASARAN PROGRAM/KEGATAN/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	
Sasaran Program	1. Meningkatkan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM	1.1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh user	70%	70%	70%	70%	Sasaran Program	1. Meningkatkan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM	1.1. Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	90%	92%	93%	94%	1.1. Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	75%	80%	85%	90%	
			70%	70%	70%	70%			2. Persentase ASN	85%	90%	92%	93%						

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
11	YUSUF RIZKY ADITYA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
12	Y. EDO BUDI PRASETYO	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
13	BAGAS HIDAYAT PURBA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
14	ABYAN MILA RIZKI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
15	IKOMING ADIKA PRANATA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
16	RYAN HERRANOR PUTRA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
17	ANINDA RIZEL KHITRAN	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
18	REVINKA DYAH FATMAHYA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
19	RINO RAHADITYA SYAHPUTRA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
20	ARY REZQY HANIK	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
21	AGWILDO FUTRA PURWANTO	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
22	M. DANA MAHDYATHA WISAPUTRA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
23	MUHAMMAD RIZKI TRILIS FAJAR	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
24	YUSUF JUNARTO	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
25	MUHAMMAD TAUFIK AKBAR FITRIYANTO	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
26	A MUH SYAQIL ASWAD SYADZUL	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Halaman 2 dari 9

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
27	ZARY UMAR RACHMAN	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
28	ADAM ADIS BUKHTAL	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
29	MUHAMMAD HSYAD MARRUF	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
30	ROCKY SIMANJUNTAK	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
31	ROFIDI DITA HAPISARI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
32	MUHAMMAD ADITYA MAJDI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
33	MUHAMMAD HILAL PRATAMA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
34	MUHAMMAD RIZKI GHIZRALI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
35	RUCKY ANDRIALATI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
36	MUHAMMAD MURTIABJI ADIATUMAJA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
37	FAHRI HAFIZ AM	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
38	RANGGA ARYA MARENDRA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
39	HAFIDZ EDZULFAIS RAHMAT	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
40	BAGINDA EKA PRADANA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
41	MUHAMMAD RIZYAD	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
42	NAUFAL FAUZI RAHMAT	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Halaman 3 dari 9

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
43	SALMA NABILA RANISSA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
44	SANDY ARIANDUNI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
45	ADITYA FAJAR NURIKHSAN	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
46	BEAUTY MAHARANI MATUTINA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
47	RENDJI SOLA GRACIA SILALAH	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
48	VIRZA SHALIA ADVIANI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
49	IGO GITA PRAKARA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
50	ADAM FIRDAUS	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
51	HARIRI MUSTIKA ALI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
52	SAMUEL BUDI SANTOSO	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI	1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
53	DELVI ADRI RAHMADANA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT
54	RENDY TRI HIDAYAT	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT
55	PANDU DHIA NUSRAHA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT
56	NOVAN SYAHPUTRA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT
57	MUHAMMAD GANI RIFAN ILMI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT
58	MARISA EPRILIA P	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN

Halaman 4 dari 9

LAPORAN KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2020

NO	NAMA	NAMA JABATAN		ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
59	MUHAMMAD RAMTAN PRATAMA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN
60	MOHAMMAD RAKA DICKI PRATAMA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN
61	YUDHA ARIE ZULKARNAIN SIREGAR	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN
62	MUHAMMAD DRAJA PRATAMA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
63	YOVIA YUSUF ADI KUNCORO	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
64	IVAN ADRIANSYAH RAHMAN	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
65	RIZDI NALFAL	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK
66	M. AIDIL AL APP	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
67	WEDATAMA DWIMAS GUMELAR	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN
68	FALZAN ALHAQQ YUANDRI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN
69	EDWIN BUDI SANTIKO	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN
70	REZA SURYA NUGRAHA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN
71	DIMAS SULISTYO GAGAH PRASOJO	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN
72	HANNA FAADHILLAH	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO - HATTA
73	ANIS ARIANI SIBAGARANG	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO - HATTA
74	FATWA FITRAZAH DESIAZ ZEIN	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO - HATTA

Halaman 5 dari 9

NO	NAMA	NAMA JABATAN		ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
75	SILVESTER YANSEN HALAWA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO - HATTA
76	MUHAMMAD AYMAN FIRRI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO - HATTA
77	MUHAMMAD WENDY HERMANSYAH	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
78	FIRDI YOGA AGUSTIAN	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
79	MUHAMMAD IMAN SEPTIAN ISLAMSIA I	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
80	REYZA HANSFANA PUTRA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
81	RINALDI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
82	MOHAMMAD RIZKI RAMADHAN	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT
83	MUHAMMAD GILANG JAYA SUDARMO	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT
84	MADE REASTU YOGANESA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT
85	WANGAPUL ALEXUS SIMBOLON	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT
86	RODUGH TIU PUTRA L. TOBIING	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN
87	MUHAMMAD BILAL BERLIANDI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO - HATTA
88	MUHAMMAD FAHRUL RIZDI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG
89	M. RIDHO BAHAR HARAHAP	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG
90	TEUKU MUHAMMAD ARIEF MAULANA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG

Halaman 6 dari 9

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
107	NAUFAL FADHILAH	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG
108	ALFANDY ADLYTHAMA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG
109	RADE PANGESTU	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PROK
110	IDA BAGUS YOGI PRANADITHA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PROK
111	SATRIA DISTA JUANG	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PROK
112	ARIKSON	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PROK
113	HSAN JOANA SUDIRAJAT	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
114	ARMED RIDHO KURNIAWAN	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
115	GEDE AGRE WIRADIPA ARIAWAN	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
116	MUHAMMAD FIRRI	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
117	ANDI NINA MUTMAINNAH	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
118	MUHAMMAD RIZQY ADITAMA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
119	TAUFIK BUDIYAN	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MULANA ENIM
120	RICKY FAJAR YANO ANGITA M.	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MULANA ENIM
121	EDY SUNARYO	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBLO
122	ENRICO YUDISTRA	ANALIS KEMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI KEMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ENTONG

Halaman 8 dari 9

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
123	TITO SATRI WICKSONO P. M	ANALIS KEIMIGRASIAN	D-IV HUKUM KEIMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN
124	SAYYID MUHAMMAD RANDI	ANALIS KEIMIGRASIAN	D-IV ADMIN/STRASI KEIMIGRASIAN	1	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tjahjo Kumolo

5. Surat Acara Pelaksanaan Pemilihan Penempatan Taruna Wreda Angkatan 51 tahun Akademik 2020 bahwa seluruh lulusan Poltekip di tahun 2020

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN
Jl. Raya Gandul No.4, Cinere – Depok, Telp. (021) 7545095

**BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENEMPATAN
TARUNA WREDA ANGKATAN 51 TAHUN AKADEMIK 2020**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 10 November 2020, telah dilaksanakan pemilihan lokasi penempatan Taruna Tingkat IV Angkatan 51 Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sesuai pilihan masing-masing taruna sebagai berikut:

STB	NAMA	PENEMPATAN
3278	SYAFIRA SALSAZILAH INAS MAISUN	Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang
3195	FAIRHA SUCI RAHMASARI	Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta
3222	LUN SRI WIDI ARTINI	Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar
3174	CHIKA PAULI ANDRIANSYAH	Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten
3281	YOLA NUR HASANAH	Balai Pemasyarakatan Kelas II Cileger
3228	MELISA YUNITA	Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung
3230	MUHAMMAD SURYA ADI WIBOWO	Balai Pemasyarakatan Kelas II Pelalangan
3272	SATRIA BUDI PERKASA	Balai Pemasyarakatan Kelas II Modun
3196	FAKIRIN RIKKI PERNANDA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang
3163	DHIMAS RONGGO WASITO	Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri
3211	ILHAM KURNIADI	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi
3175	BREMA JAYA PUTRANTA BARUS	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai
3181	ANDARI RIZKY AMIA PUTKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jambi
3241	MUHAMMAD YUSUF PAMUNGKAS	Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang
3184	DIASTI RIZKI RAMADHAN	Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati
3276	SARASWATI	Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang
3186	FAUZI SAHARI RAMADHAN	Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonorejo
3218	JULIAN LESMANA	Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegara
3199	PELIX PRATNA TARIHAN	Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan
3206	HELINTO SURYADI	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan
3181	DESMAN AGUNG PRASETYA	Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro
3287	RICKY FARRIZA	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember
3245	NOVO FIRMANNO	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Batam
3217	JOSUA HARMONANGAN BANGUN	Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan
3221	LUOWIG MUHAMMAD SUKAMADJAJA	Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan
3194	FALDY MUHAMMAD ARIJAH	Balai Pemasyarakatan Kelas II Karang Asem
3232	MUHAMMAD AGUNG ADYANATHA	Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Kotabumi
3202	BALCH DHARMA PUTRA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang
3164	ANSA CAHYANI	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karang Asem

3277	TAQY FAUZAN GIYANDRI	Balai Pemasyarakatan Kelas II Nuskambangan
3151	ADNAN WAHYU NOVIANDI	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung
3280	WAHYU ANANDA	Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru
3238	MUHAMMAD IQBAL RAHMAN	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Matras
3186	DAVID SOROZ	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
3251	RAWADINA UMARO	Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang
3172	BILLY ANUL ILHAM	Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan
3268	RYAN WAHYU FRIANSYAH	Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram
3234	MUHAMMAD CERES YUSUF ALTHUR	Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar
3145	ABDURRAHMAN FAIZAL BAHARI	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang
3191	FADLAN SAHAN	Balai Pemasyarakatan Kelas II Makassar

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dr. Rachmayanthi, Bc.IP. S.H., M.Si.
NIP. 19690428 199203 2 001

Depok, 10 November 2020
Ka. Prodi
Bimbingan Kemasyarakatan

Ali Muhammad, A.K.S., S.Sos., M.Si.
NIP. 19740213 199403 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN
Jl. Raya Gandul No.4, Cinere – Depok, Telp. (021) 7545096

**BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENEMPATAN
TARUNA WREDA ANGKATAN 51 TAHUN AKADEMIK 2020**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 10 November 2020, telah dilaksanakan pemilihan lokasi penempatan Taruna Tingkat IV Angkatan 51 Program Studi Teknik Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sesuai pilihan masing-masing taruna sebagai berikut:

NO.	STB	NAMA	PENEMPATAN
1	3158	ALDO PRATAMA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak
2	3210	IKHSAN UNTANG KAMACHAN	Rumahnya Negara Kelas IIA Batam
3	3249	MUHAMMAD SYAHDIYAN	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh
4	3170	BAVU RIZKY	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkal Pinang
5	3243	NELLYA KETAREN	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan
6	3130	ADITYA NUGRAHA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang
7	3272	SULUNG PURNACHMAN	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
8	3278	TRY WAHYUDI	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja
9	3163	RAIZ FAKHRI ELWARA	Rumahnya Negara Kelas IIA Balikpapan
10	3200	IRMAN ASSIDDIQI	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
11	3232	RANGGA WAHYU DHIKA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram
12	3127	ALDI PRAWATAMA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tatanan
13	3147	ABDUL MAULI MUTHAID	Rumahnya Negara Kelas IIA Pinrang
14	3248	BADEN MUHAMMAD RIZKI H	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda
15	3202	ISLAM HIZA MAHENDRA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro
16	3285	ZAKY BIMA KUSUMA ALIYAN	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli
17	3176	BRILIAN YUANAS SANJATA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung
18	3124	AFIPUDIN MUHAMMAD YUNUS	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karangasem
19	3244	NOEL TULUMBAN TOBIN	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemalang Sentar
20	3152	AFIF ADHAN ZUHAR	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Pinang
21	3215	IRMAN RAKA RIMANSYAH	Rumahnya Negara Kelas IIA Palangkaraya
22	3156	AHMAT RULLY HERLIANSYAH	Rumahnya Negara Kelas IIA Baturaja
23	3171	BENRI	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi
24	3267	RUTH FEBRIANI TELUMBANUA	Rumahnya Negara Kelas I Labuan Del
25	3168	ABDUL MALIK PAJAR DARWIS	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Dora-pora
26	3263	RIZKY HAMONANGAN SIMANJUNTAK	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan
27	3219	KHOSIM NUR ZAMAN	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
28	3250	MUHAMMAD HILMI KAHMAN A	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sampit
29	3232	MUHAMMAD AGUNG BAGHTIAS	Rumahnya Negara Kelas IIB Dumai

30	3216	RICKY ILIRIYADI	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan
31	3243	RIYU SETYO PRABOWO	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbal Bago
32	3214	MAHAYITA DWI SEPDIHARJA	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bandar Lampung
33	3210	LUDI OKTADHKA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kobar
34	3262	ANDRE STUMUDRANG	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lingsar
35	3246	A. FERNUS	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nuara Bati
36	3219	RIZKI FARMAD PUTRA PERKASA	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Baram
37	3215	BOSSY GAGIVA SIRMIRING	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
38	3219	DIKA JENITA T	Rumahnya Negara Kelas IIA Manado
39	3212	INDRA BANTONG	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Watampene
40	3210	ALMAVICO PUTRA PERDANA	Rumahnya Negara Kelas IIB Uluwatu
41	3216	CHANDRA SUJANA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Tinggi
42	3164	ELIZ GADIS MUAJADDID	Rumahnya Negara Kelas IIB Bengkulu
43	3261	RIZKI SYAHPUTRA	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang
44	3216	JAKA AMET SUSILA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabanjahe
45	3217	DOOZY SEPILAN PUTRA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru
46	3214	MARVEYUSALATH KORI PUTRA	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Nuara Saba
47	3210	BAVU KUSYANTO TILAS	

Diketahui Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Dr. Rachmayanthi, Bc.P., S.H., M.Si.
NIP. 19690426 199203 2 001

Depok, 10 November 2020
Ka. Prodi
Teknik Pemasyarakatan



Inan Soetosa, S.Pd., M.G.
NIP. 19790901 200501 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN
Jl. Raya Gandul No.4, Cinere – Depok, Telp. (021) 7545096

**BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENEMPATAN
TARUNA WREDA ANGKATAN 51 TAHUN AKADEMIK 2020**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 10 November 2020, telah dilaksanakan pemilihan lokasi penempatan Taruna Tingkat IV Angkatan 51 Program Studi Manajemen Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sesuai pilihan masing-masing taruna sebagai berikut:

NO.	STB	NAMA	PILIHAN PENEMPATAN
1	3283	YUSHA CAHYO PRABOWO	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
2	3146	ADITHA KURNIAWAN	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin
3	3262	YOSHA UNIS PERI	Rumahnya Negara Kelas I Medan
4	3222	RAHMADA ESTRI MAULA	Rumahnya Negara Kelas I Pekanbaru
5	3148	RIZKI RIA TRI JAYANTI	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung
6	3214	AYAH ZONA RIANTORI	Rumahnya Negara Perempuan Kelas I Medan
7	3260	RIYANTO	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan
8	3223	LUTTI KURNIAWAN	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam
9	3160	BAHUTYAS MANGSALA SUTRA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya
10	3162	DEVA DERMAWAN FERDINANTO	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar
11	3208	HERMAWATI YUSUF PUSPOMARBO	Rumahnya Negara Kelas I Samarinda
12	3160	DINAS CHINANG SUTAWIYATI	Rumahnya Negara Kelas I Bandar Lampung
13	3273	ARYALDI WAHYU UTOMO	Rumahnya Negara Kelas I Tanjung Pinang
14	3203	GURU ALAM	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sungguminaya
15	3174	BONI HASBIHAN MANULANG	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Asahan
16	3225	MUHAMMAD ADI PUTRA	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang
17	3160	ALVIN DIANUDIN PRATAMA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaperbangsa
18	3226	MUHAMMAD FAHURRIZKI	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dumai
19	3172	ABDUL KHAIR HANAFI	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selangor
20	3272	SEPTIANA DWI ANGGRAINI	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar
21	3167	AKSETIYA BAYU PRASETYO	Rumahnya Negara Kelas IIA Pontianak
22	3163	AFAN SEFANIR	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalimantan
23	3160	ELSAFIRA MAGRIYOTI RESKANTA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gunung Sugih
24	3271	SATRIA AGUNG PRABOWO	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotaagung
25	3227	M. SIDDANS MARRIATULLAH	Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Banda Aceh

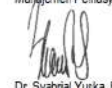
26	3279	VINCENTILS ANDHKA WIJAYA	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Penatung Sentar
27	3204	SHANY ARRASID TAMRIN	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkal Pinang
28	3266	RONALDO CHRISTIAN	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado
29	3201	IRMAN PRATAMA PUTRA	Lembaga Pemasyarakatan Bontang
30	3260	RIAN WILDA RACHMAN TASYA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau
31	3207	HENDRATA ALEF SUKOHARYO	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Mataram
32	3197	PAULAN	Rumahnya Negara Kelas IIB Padang
33	3247	PATRA RAHASIAWI	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Samarinda
34	3240	PUSPITADINI CAHYANING UTAM	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru
35	3163	ANDRI RINANDA ILHAM	Rumahnya Negara Kelas IIB Rengas
36	3280	DWI PUTRA MELINDA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan
37	3177	BRILIAN HANEUDA PUTRA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkajene
38	3227	MIFTAHUS SURUR RAMADHAN	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palangkaraya
39	3186	DINI RAMAYANI	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Mamuju
40	3169	BAKU PRASETYO ABULLAH	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang
41	3261	YUSHA ARNALDY ADIRA	Rumahnya Negara Kelas IIB Prabumulih
42	3213	INDRA RUMMANA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lingsar
43	3264	ROBI SETIAWAN TRISEMI	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak
44	3233	MUHAMMAD ARIQ TRIYANTO	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari
45	3268	ROLANDO FERNANDO VE RENALDY CAESAR ADITYAMA PUTRA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano
46	3234	RENALDY CAESAR ADITYAMA PUTRA	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung
47	3229	MUHAMMAD ADIL SYAPUTRA	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi
48	3208	HENDRO NUGROHO	Rumahnya Negara Kelas IIA Paly

Diketahui Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Dr. Rachmayanthi, Bc.P., S.H., M.Si.
NIP. 19690426 199203 2 001

Depok, 10 November 2020
Ka. Prodi
Manajemen Pemasyarakatan



Dr. Syahrial Yuska, Bc.P., S.H., M.H.
NIP. 19641218 198503 1 001